



# LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN NEGERI  
PANGKALAN BALAI



Website : [www.pn-pangkalanbalai.go.id](http://www.pn-pangkalanbalai.go.id)  
Email : [pn.pangkalanbalai@gmail.com](mailto:pn.pangkalanbalai@gmail.com)

**ALAMAT:**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemda banyuasin. Jl. Lintas Sumatera  
Palembang-Betung, Kab. Banyuasin. Prov. Sumatera Selatan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama periode 2023. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor:4108/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dan juga surat dari Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 4286/KPT.W6-U/OT1.6/XII/2023 tanggal : 27 Desember 2023 Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama Tahun 2023, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini tentu saja masih jauh dari sempurna, karenanya kritik, saran dan koreksi sangat kami harapkan.

Pangkalan Balai, 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



**NOFITA DWI WAHYUNI**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi .....	iii
BAB I   PENDAHULUAN .....	1
BAB II   A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM.....	4
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	4
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	5
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	5
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	5
B. PENYELESAIAN PERKARA .....	6
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus.....	6
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	7
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.....	7
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Melalui Mediasi.....	8
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi.....	8
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL .....	9
1. Posbakum.....	9
2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	9
3. Perkara Prodeo.....	9
BAB III   SUMBER DAYA MANUSIA .....	11
KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/ PENDIDIKAN.....	11
A. Mutasi .....	17
B. Promosi .....	19
C. Pensiun .....	20
D. Diklat .....	20
BAB IV   PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA & TI .....	24

A. Pengelolaan Keuangan.....	24
1. DIPA Badan Urusan Administrasi .....	24
2. DIPA Dirjen Badilum.....	25
B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana.....	26
1. Gedung Dan Bangunan.....	27
2. Rumah Dinas.....	30
3. Kendaraan Bermotor.....	30
4. Fasilitas Perkantoran .....	30
C. Pengelolaan Teknologi Informasi.....	31
1. Implementasi e-Court.....	33
2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.....	34
BAB V   PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....	35
A. Pembangunan Zona Integritas.....	35
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	36
C. Inovasi Pelayanan Publik.....	41
BAB VI   PENGAWASAN.....	44
A. Internal.....	46
B. Evaluasi.....	48
BAB VII   PENUTUP.....	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Rekomendasi.....	50
LAMPIRAN.....	52



## Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Keadaan perkara Tingkat pertama .....	4
Tabel 2. 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	5
Tabel 2. 3 Keadaan Perkara Tingkat kasasi .....	5
Tabel 2. 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	5
Tabel 2. 5 Perkara Pidana .....	6
Tabel 2. 6 Perkara Perdata .....	6
Tabel 2. 7 Perkara Pidana .....	7
Tabel 2. 8 Perkara Perdata .....	7
Tabel 2. 9 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk .....	8
Tabel 2. 10 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi .....	8
Tabel 2. 11 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi .....	8
Tabel 3. 1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2023 .....	11
Tabel 3. 2 Statistik Pegawai Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2023 (Lanjutan) .....	12
Tabel 3. 3 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil .....	12
Tabel 3. 4 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan) .....	13
Tabel 3. 5 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan) .....	14
Tabel 3. 6 Sumber Daya Manusia Tenaga Honoror (PPNPN) .....	14
Tabel 3. 7 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial .....	15
Tabel 3. 8 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial .....	15
Tabel 3. 9 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang .....	16
Tabel 3. 10 Golongan IV .....	16
Tabel 3. 11 Golongan III .....	16
Tabel 3. 12 Golongan II .....	17
Tabel 3. 13 Golongan I .....	17
Tabel 3. 14 Mutasi .....	18
Tabel 3. 15 Mutasi (Lanjutan) .....	18
Tabel 3. 16 Promosi .....	19
Tabel 3. 17 Promosi (Lanjutan) .....	19
Tabel 3. 18 Pensiun .....	20
Tabel 3. 19 Pendidikan dan Pelatihan .....	20
Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran DIPA 01 .....	25
Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran DIPA 03 .....	26
Tabel 4. 3 Gedung dan Bangunan .....	27
Tabel 4. 4 Rumah Dinas .....	30
Tabel 4. 5 Kendaraan Bermotor .....	30
Tabel 4. 6 Fasilitas Perkantoran .....	30
Tabel 4. 7 Dukungan Teknologi Informasi .....	32
Tabel 4. 8 Implementasi E-Court .....	33
Tabel 6. 1 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan .....	45

## Daftar Gambar

Gambar 4. 1 Test Mbps Melalui Mikrotik .....	31
Gambar 4. 2 Test Mbps Melalui Mikrotik .....	32
Gambar 4. 3 Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri .....	34
Gambar 4. 4 Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri .....	34
Gambar 5. 1 Nilai Evaluasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada Aplikasi PMPZI .....	35
Gambar 5. 2 Meja PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai .....	38
Gambar 5. 3 Kursi Tamu Terbuka .....	38
Gambar 5. 4 Komputer Survei .....	38
Gambar 5. 5 Meja Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai .....	39
Gambar 5. 6 Jalur Difable .....	39
Gambar 5. 7 CCTV .....	40
Gambar 5. 8 Kursi Roda .....	40
Gambar 5. 9 Dispenser .....	40
Gambar 5. 10 Spanduk .....	40
Gambar 5. 11 Astasikum .....	41
Gambar 5. 12 Vidio Siperkum pada Youtube .....	42
Gambar 5. 13 Spanduk SIAP pada Sosial Media .....	42
Gambar 5. 14 Vidio Viladifa pada Youtube .....	43
Gambar 5. 15 Kegiatan Kiss MI .....	43
Gambar 6. 1 Rapat evaluasi hakim pengawas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi

masyarakat para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”**.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja



badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya suatu organisasi dapat selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023.

## BAB II

### A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Perkara yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II terdiri dari Perkara Pidana dan Perkara Perdata. Jumlah Perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2023 sejak bulan Januari sampai bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut :

#### 1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tingkat pertama per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Keadaan perkara Tingkat pertama

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA TAHUN 2022	PERKARA MASUK TAHUN 2023	PERKARA YANG PUTUS/ CABUT TAHUN 2023	SISA PERKARA TAHUN 2023
1.	Pidana Biasa	81	383	405	59
2.	Pidana Anak	2	19	20	1
3.	Pidana Singkat	0	0	0	0
4.	Pidana Cepat	0	18	18	0
5.	Praperadilan	0	2	1	0
6.	Lalulintas	0	3505	3505	0
7.	Perdata Gugatan	14	37	35	15
8.	Perdata Bantahan	-	-	-	-
9.	Perdata Gugatan Sederhana	0	22	19	3
10.	Perdata Permohonan	0	25	22	3

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Keadaan perkara tingkat banding per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN N BANDING	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	34	33	0	18
2.	Pidana Anak	4	4	0	0
3.	Perdata Gugatan	14	16	0	1

## 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Keadaan perkara tingkat kasasi per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Keadaan Perkara Tingkat kasasi

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN KASASI	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	14	16	0	5
2.	Pidana Anak	1	1	0	0
3.	Perdata Gugatan	14	4	0	16

## 4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Keadaan perkara tingkat peninjauan kembali per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	KLASIFIKASI PERKARA	MENGAJUKAN PK	PUTUS	DICABUT	BELUM PUTUS
1.	Pidana Biasa	1	2	0	1
2.	Pidana Anak	0	0	0	0
3.	Perdata Gugatan	1	2	0	0

## B. Penyelesaian Perkara

### 1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara tahun 2022 yang diputus pada tahun 2023 sebagai berikut :

#### a. Perkara Pidana

Tabel 2. 5 Perkara Pidana

	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	PUTUS	SISA PERKARA TAHUN 2023
1.	Pidana Biasa	81	405	59
2.	Pidana Anak	2	20	1
3.	Pidana Singkat	0	0	0
4.	Pidana Cepat	0	18	0
5.	Praperadilan	0	1	0
6.	Lalulintas	0	3505	0

#### b. Perkara Perdata

Tabel 2. 6 Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	SISA PERKARA TAHUN 2022	PUTUS	SISA PERKARA TAHUN 2023
1.	Perdata Gugatan	14	35	15
2.	Perdata Gugatan Sederhana	0	19	3
3.	Perdata Permohonan	0	22	3

## 2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

### a. Perkara Pidana

Tabel 2. 7 Perkara Pidana

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Pidana Biasa	383	405
2.	Pidana Anak	19	20
3.	Pidana Singkat	0	0
4.	Pidana Cepat	18	18
5.	Praperadilan	2	1
6.	Lalulintas	3505	3505

### b. Perkara Perdata

Tabel 2. 8 Perkara Perdata

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU
1.	Perdata Gugatan	37	22
2.	Perdata Gugatan Sederhana	22	19
3.	Perdata Permohonan	25	22

## 3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 9 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi Dan Pk

NO	KLASIFIKASI PERKARA	YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM		
		BANDING	KASASI	PK
1.	Pidana Biasa	349	369	382
2.	Pidana Anak	15	18	19
3.	Perdata Gugatan	23	23	36

#### 4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DI MEDIASI

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL DI MEDIASI
1.	Perdata Gugatan	37	1

#### 5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

NO	KLASIFIKASI PERKARA	PERKARA MASUK	PERKARA YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI
1.	Pidana Anak	19	3

## **C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL**

### **1. Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2023 mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) untuk 240 Jam Pelayanan. Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menggandeng Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum “Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Pangkalan Balai”

### **2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan satker yang baru dibentuk pada tahun 2018. Untuk periode 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai belum dapat melaksanakan kegiatan persidangan keliling dikarenakan ketiadaannya anggaran terkait kegiatan tersebut dalam DIPA dan Rka k/L tahun 2023.

### **3. Perkara Prodeo**

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo menggunakan anggaran APBN.

Pada tahun 2023 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.



## BAB III

### SUMBER DAYA MANUSIA

#### **Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ pendidikan**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai hingga laporan ini dibuat berjumlah 40 (empat puluh) Orang personil yang terdiri dari 7 (tujuh) Orang Hakim, 8 (Delapan) Orang Pejabat Struktural, 10 (sepuluh) Orang Pejabat Fungsional, 6 (enam) Orang Pelaksana, 1 (satu) orang PPPK dan 8 (delapan) Orang PPNPN. Berikut ini statistik pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023:

*Tabel 3. 1 Statistik Pegawai Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2023*

NO	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
1	Ketua	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2	Wakil Ketua	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Hakim	5	-	-	-	-	1	4	-	-	-	5	-
4	Panitera	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
5	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
6	Panmud Hukum	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
7	Panmud Perdata	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8	Panmud Pidana	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
9	Ka.Sub.Bag Kepegawaian dan Ortala	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
10	Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
11	Ka.Sub.Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

Tabel 3. 2 Statistik Pegawai Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai 2023 (Lanjutan)

NO	NAMA JABATAN	JLH (ORG)	PENDIDIKAN							GOLONGAN			
			SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV
12	Panitera Pengganti	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	7	-
12	Panitera Pengganti	7	-	-	-	-	3	4	-	-	-	7	-
13	Jurusita	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-
14	Jurusita Pengganti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Pelaksana	6	-	-	2	2	2	-	-	-	3	3	-
16	PPPK	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	-	-	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	-	-	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>2</b>

## Profil Sumber Daya Manusia

### a. Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2023:

Tabel 3. 3 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
1	NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.	Ketua	Pembina Tk. I	IV/b	
2	FITRI AGUSTINA, S.H.	Wakil Ketua	Pembina	IV/a	
3	HARI MUKTIYONO, S.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
4	SYARIFA YANA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
5	AGEWINA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
6	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
7	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tk.I	III/b	
8	WARNO, S.H.	Panitera	Penata Tk.I	III/d	

Tabel 3. 4 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	KET
9	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.	Sekretaris	Penata Tk.I	III/d	
10	A HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk.I	III/d	
11	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	Penata Tk.I	III/d	
12	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata	Penata	III/c	
13	M. IMAN SEPTIAN, S.IP.	Kepala Sub Bagian	Penata Tk. I	III/d	
14	MUTIARA SAPUTRI, S.E.	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk. I	III/b	
15	RAHMAT JUNIANSYAH	Kepala Sub Bagian	Penata Muda Tk.I	III/b	
16	ISNATA TAKASURI, S.H	Panitera Pengganti	Penata Tk. I	III/d	
17	WENNY PUSPITA SARI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
18	AL IHSAN ALAMSYUR, S.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
19	BRENDY SUTRA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
20	YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
21	MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
22	HIKMAWATI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Penata	III/c	
23	M. BUDIANTO, S.E	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
24	MELLY NORVIANA, A.Md	Jurusita	Penata Muda Tk. I	III/b	
25	MARDHIYAN SAPUTRA, A.Md.	Jurusita	Penata Muda Tk.	III/b	

			I	
26	ENDANG AZHARI	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda Tk. I	III/b
27	JIHAN PUTRI ZUZANGGI, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a
28	ZULPAN ARYANTO	Klerek – Pengadministrasi Perkantoran	Pengatur Tk. I	II/d
29	DEA ANGGITA, A.Md.	Klerek – Penelaah Teknis Kebijakan	Pengatur	II/c
30	WAHIDA SOPHIE HIDAYANTI, S.H.	Klerek – Analisis Perkara Peradilan	Penata Muda	III/a
31	EUNIKE MAYERNI BATUBARA , A.Md. AB	Klerek – Pengelola Penanganan Perkara	Pengatur	II/c
32	MAHMUDAH, A.Md.A.B.	Arsiparis Pelaksana	-	VII

Tabel 3. 5 Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Lanjutan)

#### b. Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

Berikut ini jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer (PPNPN) yang ada pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2021 :

Tabel 3. 6 Sumber Daya Manusia Tenaga Honorer (PPNPN)

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	ERWANZA	Pengamanan	
2	FAISAL RIFA'I, A.Md	Pengemudi	
3	ABDUL HADI	Pramubakti	
4	M. FADHIEL YUSUF, S.H.	Pramubakti	
5	M. RAMADHONI, S.H.	Pengamanan	
6	CITRA PUSPITA SARI, S.T.	Pramubakti	
7	TITAH ADELIA ROSY, S.H.	Pramubakti	

8	RISKA YANTI, S.H.	Pramubakti	
---	-------------------	------------	--

### c. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Tabel 3. 7 Sumber Daya Manusia Teknis

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Hakim (Ketua / Wakil)	2	5	7
2	Panitera	1	-	1
3	Panitera Muda Hukum	1	-	1
4	Panitera Muda Perdata	1	-	1
5	Panitera Muda Pidana	1	-	1
6	Panitera Pengganti	4	3	7
7	Jurusita	2	1	3
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>

Yudisial

### d. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Tabel 3. 8 Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kasubag Umum dan Keuangan	1	-	1
3	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	-	1	1
4	Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	-	1
5	Pelaksana	2	4	6
6	PPPK	-	1	1
7	Tenaga Honorer (PPNPN)	5	3	8
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>	<b>9</b>	<b>19</b>

## e. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

Tabel 3. 9 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Golongan IV	-	2	2
2	Golongan III	16	10	26
3	Golongan II	1	2	3
4	Golongan I	-	-	-
5	PPPK	-	1	1
6	Tenaga Honorer (PPNPN)	5	3	8
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>18</b>	<b>40</b>

### Golongan IV

Tabel 3. 10 Golongan IV

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
4	Pembina Tk. I (IV/b)	-	1	1
5	Pembina (IV/a)	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

### Golongan III

Tabel 3. 11 Golongan III

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Penata Tk.I (III/d)	5	1	6
2	Penata (III/c)	5	2	7
3	Penata Muda Tk. (III/b)	6	5	11
4	Penata Muda (III/a)	-	2	2

<b>Jumlah</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>
---------------	-----------	-----------	-----------

## Golongan II

Tabel 3. 12 Golongan II

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Pengatur Tk.I (II/d)	1	-	1
2	Pengatur (II/c)	-	2	2
3	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	-	-
5	PPPK	-	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

## Golongan I

Tabel 3. 13 Golongan I

NO	JABATAN	PRIA	WANITA	JUMLAH
1	Juru Tk.I (I/d)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	-	-
3	Juru Muda Tk.I (I/b)	-	-	-
4	Juru Muda (I/a)	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### A. MUTASI

Selama tahun 2023 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 14 Mutasi

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris PN Pangkalan Balai	Sekretaris PN Subang	Mutasi Keluar
2	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.	Kasubbag. Umum dan Keuangan PN Sekayu	Sekretaris PN Pangkalan Balai	Mutasi Masuk
3	DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Pangkalan Balai	Analisis Tata Laksana PT TUN Palembang	Mutasi Keluar
4	M. BUDI KURNIAWAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Pangkalan Balai	Panitera Pengganti PN Lahat	Mutasi Keluar

Tabel 3. 15 Mutasi (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
5	DESTI DWI AMANDA, A.Md.	Pengelola Perkara PN Pangkalan Balai	Pengelola Perkara PN Palembang	Mutasi Keluar
6	ADE KURNIAWAN, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan PN Pangkalan Balai	Pengelola Sistem dan Jaringan PT TUN Palembang	Mutasi Keluar
7	ERA USTHI ANGGRAINI	Pengadministrasi Registrasi Perkara PN Pangkalan Balai	Pengadministrasi Registrasi Perkara PT TUN Palembang	Mutasi Keluar



## B. PROMOSI

Selama tahun 2023 terdapat beberapa Hakim dan pegawai yang promosi jabatan, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Promosi

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
1	ENDANG EFENDI, S.E., M.M.	Sekretaris PN Pangkalan Balai	Sekretaris PN Subang	Promosi
2	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.	Panitera Muda Perdata PN Pangkalan Balai	Panitera Muda Pidana PN Pangkalan Balai	Promosi
3	ARIF BUDIMAN JAYA ANUGRAH, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana PN Pangkalan Balai	Panitera Muda Perdata PN Pangkalan Balai	Promosi

Tabel 3. 17 Promosi (Lanjutan)

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KET.
4	MUTIARA SAPUTRI, S.E.	Analisis Tata Laksana PN Pangkalan Balai	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana PN Pangkalan Balai	Promosi
5	M. BUDI KURNIAWAN, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Pangkalan Balai	Panitera Pengganti PN Lahat	Promosi

### C. PENSIUN

Dalam kurun waktu dari Januari s.d. Desember 2023 tidak ada baik itu hakim maupun non-hakim yang pensiun.

Tabel 3. 18 Pensiun

NO	NAMA	JABATAN	PANGKAT GOL/RUANG	KET.
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

### D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pada tahun 2023 terdapat orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan diantaranya;

Tabel 3. 19 Pendidikan dan Pelatihan

No.	Nama	Diklat Yang Diikuti	Tanggal Kegiatan
1	2	3	4
1.	<b>ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H., M.H.</b>	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I)	30 Januari 2023 s.d. 11 Februari 2023
2.	<b>SYARIFA YANA, S.H., M.H.</b>	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Bangka Belitung dan Sumatera Selatan	20 Februari 2023 s.d. 4 Maret 2023
3.	<b>HARI MUKTIYONO, S.H.</b>	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum PT Bangka Belitung dan Sumatera Selatan	20 Februari 2023 s.d. 4 Maret 2023

4.	<b>FITRI AGUSTINA, S.H.</b>	Pelatihan Sertifikasi Perikanan bagi Hakim Peradilan Umum seluruh Indonesia	27 Februari 2023 s.d. 18 Maret 2023
5.	<b>DWI INDAH ROSALINA, S.H., M.H.</b>	Pelatihan Manajemen ASN Angkatan I	7 Maret 2023 s.d. 17 Maret 2023
6.	<b>ENDANG EFENDI, S.E., M.M.</b>	Pelatihan Manajemen ASN Angkatan I	7 Maret 2023 s.d. 17 Maret 2023
7.	<b>M. IMAN SEPTIAN, S.IP.</b>	Pelatihan Online Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SPIP) Angkatan XI Tahun 2023	3 Juli 2023 s.d. 7 Juli 2023
8.	<b>M. BUDIANTO, S.E.</b>	Pelatihan Teknis Yudisial Juru Sita dan Juru Sita Pengganti di lingkungan Peradilan Umum	25 September 2023 s.d. 07 Oktober 2023
9.	<b>MAHMUDAH, A.Md.A.B.</b>	Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Mahkamah Agung RI Angkatan II Tahun 2023	25 September 2023 s.d. 25 Oktober 2023
10.	<b>FITRI AGUSTINA, S.H.</b>	Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Angkatan XIX Tahun 2023	12 Oktober 2023 s.d. 8 November 2023
11.	<b>FITRI AGUSTINA, S.H.</b>	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengembangan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan	22 November 2023 s.d. 24 November 2023
12.	<b>WARNO, S.H.</b>	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengembangan Zona Integritas pada Area	22 November 2023 s.d. 24 November 2023

		Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan	
13.	<b>ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.</b>	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengembangan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan	22 November 2023 s.d. 24 November 2023
14.	<b>M. IMAN SEPTIAN, S.IP.</b>	Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pengembangan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan	22 November 2023 s.d. 24 November 2023
15.	<b>DEA ANGGITA, A.Md.</b>	Rapat Koordinasi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya Tahun Anggaran 2023	26 November 2023 s.d. 29 November 2023
16.	<b>ENDANG AZHARI</b>	Sosisialisasi Petunjuk Teknis Mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) dan Tata Cara Pelaksanaan Survei Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Implementasi	28 November 2023

		Sistem Informasi dan Teknologi Ditjen Perbendaharaan Tahun 2023 dan <i>Press Release</i> APBN Bulan Oktober 2023	
--	--	--	--

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran). Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2023 memiliki 2 (dua) DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.401909/2023 dengan total pagu DIPA Awal sebesar Rp. 10.932.172.000,- (*sepuluh milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*) yang mana terdapat penambahan anggaran dari pusat untuk pembelian Genset menjadi 11.752.414.000,- (*sebelas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah*) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : SP DIPA-005.03.2.402017/2023 dengan total pagu awal sebesar Rp. 187.800.000,- (*seratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*)

##### **1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)**

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2023.

## - Realisasi Anggaran DIPA 01

Tabel 4. 1 Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	<b>EBA.994</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				
1.	001	Gaji dan Tunjangan	3.699.983.00 0	3.352.438.647	347.544.3 53	90,6 1
2.	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.408.889.00 0	1.357.447.046	51.441.95 4	96,3 5
	<b>EBA.962</b>	<b>Layanan Umum</b>				
3.	051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	4.446.000	4.440.000	6.000	99,8 7
	<b>EBB.951</b>	<b>Layanan Sarana Internal</b>				
4.	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	850.482.000	847.000.000	3.482.000	99,5 9
	<b>EBB.971</b>	<b>Layanan Prasarana Internal</b>				
5.	051	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	5.788.614.00 0	5.685.014.325	103.599.6 75	98.2 1
<b>Total</b>			<b>11.752.414.0 00</b>	<b>11.246.340.01 8</b>	<b>506.073.9 82</b>	<b>95,6 9</b>

## 2. DIPA Dirjen Badilum (03)

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2023.

## - Realisasi Anggaran DIPA 03

Tabel 4. 2 Realisasi Anggaran DIPA 03

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
	<b>QBA.032</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>				
1.	051	Pos Bantuan Hukum	<b>24.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>BCA.U03</b>	<b>Perkara Hukum Perseorangan</b>				
2.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	<b>66.405.000</b>	<b>64.395.925</b>	<b>2.009.075</b>	<b>96,97</b>
3.	052	Penetapan Hari Sidang	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
4.	053	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	<b>23.740.000</b>	<b>22.782.920</b>	<b>957.080</b>	<b>95,97</b>
5.	055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan terdakwa	<b>14.080.000</b>	<b>13.394.620</b>	<b>685.380</b>	<b>95,13</b>
6.	056	Minutasi/Upaya Hukum	<b>31.800.000</b>	<b>31.062.500</b>	<b>737.500</b>	<b>97,68</b>
7.	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	<b>4.800.000</b>	<b>3.958.440</b>	<b>841.560</b>	<b>82,47</b>
8.	058	Penanganan Perkara Kasasi & PK di Pengadilan Tingkat Pertama	<b>2.925.000</b>	<b>2.617.500</b>	<b>307.500</b>	<b>89,49</b>
<b>Total</b>			<b>167.800.000</b>	<b>160.211.905</b>	<b>7.588.095</b>	<b>95,48</b>

## B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

## 1. Gedung dan Bangunan

Tabel 4. 3 Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	<b>GEDUNG KANTOR</b>	Tanah Gedung Kantor	Sertifikat
		Bangunan Gedung Kantor	Sudah Menempati Kantor Baru Per 05 Desember 2022
2	<b>RUANG KERJA</b>	Ruang Ketua	Ada
		Ruang Wakil Ketua	Ada
		Ruang Hakim	Ada
		Ruang Panitera	Ada
		Ruang Panitera Muda	Ada
		Ruang Panitera Pengganti	Ada
		Ruang Juru Sita dan Juru Sita Pengganti	Ada
		Ruang Sekretaris	Ada
		Ruang Kepala Sub Bagian	Ada
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	Ada
		Ruang Penasihat Hukum	Ada
		Ruang Rapat	Ada
		Ruang Perpustakaan	Ada
		Ruang Arsip	Ada
		Ruang Gudang	Ada
		Ruang Server	Ada
Ruang Toilet Pegawai	Ada		
Ruang Toilet Pegawai Hakim	Ada		
Ruang Tamu Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat pada Bagian Depan Gedung</li> <li>- Ruangan Terbuka (Tidak Tertutup)</li> <li>- Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka</li> </ul>		

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
			Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	<b>SARANA LINGKUNGAN GEDUNGAN KANTOR</b>	Pagar Keliling	Ada
		Pos Jaga	Ada
		Tempat Parkir Kendaraan	Ada
		Akses Jalan	- Pengerasan Jalan Menggunakan Cor Beton
		Taman	- Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias
		Akses Difabel	- Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	- Terdapat 32 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i> - 2 Titik tambah Kamera CCTV <i>Full HD</i> dari Mahkamah Agung
4	<b>RUANG PELAYANAN</b>	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	- Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Ruang Sidang	- Terdapat 4 Ruang Sidang (Ruang Sidang Utama, Ruang Sidang Pidana, Ruang Sidang Perdata dan Ruang Sidang Anak - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) Central. - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
			mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu dan Lain-lain - Dilengkapi dengan Peralatan Sidang Online
		Ruang Tunggu Sidang	- Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan <i>Free</i> WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas
		Ruang Tunggu Ramah Anak	Ada
		Ruang Tunggu PK, Bapas, Penasihat Hukum dan Pekerjaan Sosial	Ada
		Ruang Posbakum	Ada dibagian Lobby Depan
		Ruang Tahanan Pria	- Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Tahanan Wanita	- Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
		Ruang Mediasi	Ada
		Ruang Kesehatan	Ada
		Ruang Diversi	Ada
		Ruang Teleconference	Ada
		Ruang Laktasi	Ada
		Toilet Umum Pria	Ada
		Toilet Umum Wanita	Ada
		Toilet Khusus Difabel	Ada
		Mushallah	Ada

## 2. Rumah Dinas

Tabel 4. 4 Rumah Dinas

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Dinas Ketua	0				
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	0				
3.	Rumah Dinas Hakim	0				
4.	Rumah Dinas Panitera	0				
5.	Rumah Dinas Sekretaris	0				

## 3. Kendaraan Bermotor

Tabel 4. 5 Kendaraan Bermotor

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
<b>Kendaraan Bermotor Roda 4</b>						
1.	Wuling Cortez	1	1			
2.	Mitsubishi XPander	1	1			Sewa
3.	Nissan X-Trail	3		3		Hibah Pemda
<b>Kendaraan Bermotor Roda 2</b>						
1.	Honda Vario	1	1			
2.	Kawasaki Trail	1	1			

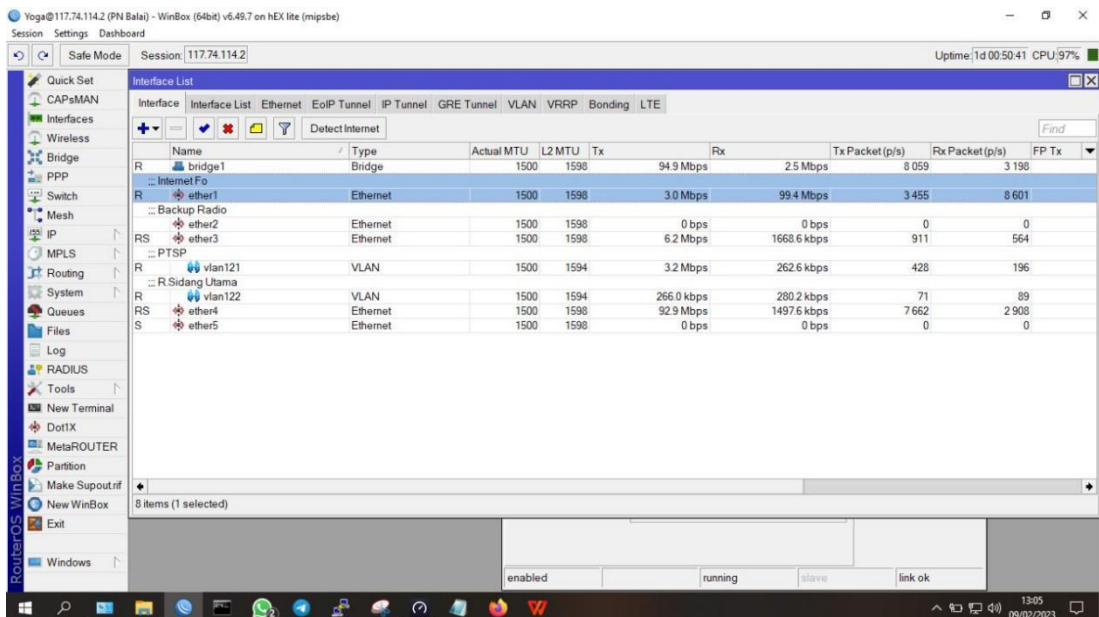
## 4. Fasilitas Perkantoran

Tabel 4. 6 Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	AC Split	6	Unit
2.	UPS	5	Unit
3.	PC	23	Unit
4.	Laptop	5	Unit
5.	Printer	6	Unit
6.	Genset 200 Kva	1	Unit

## C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

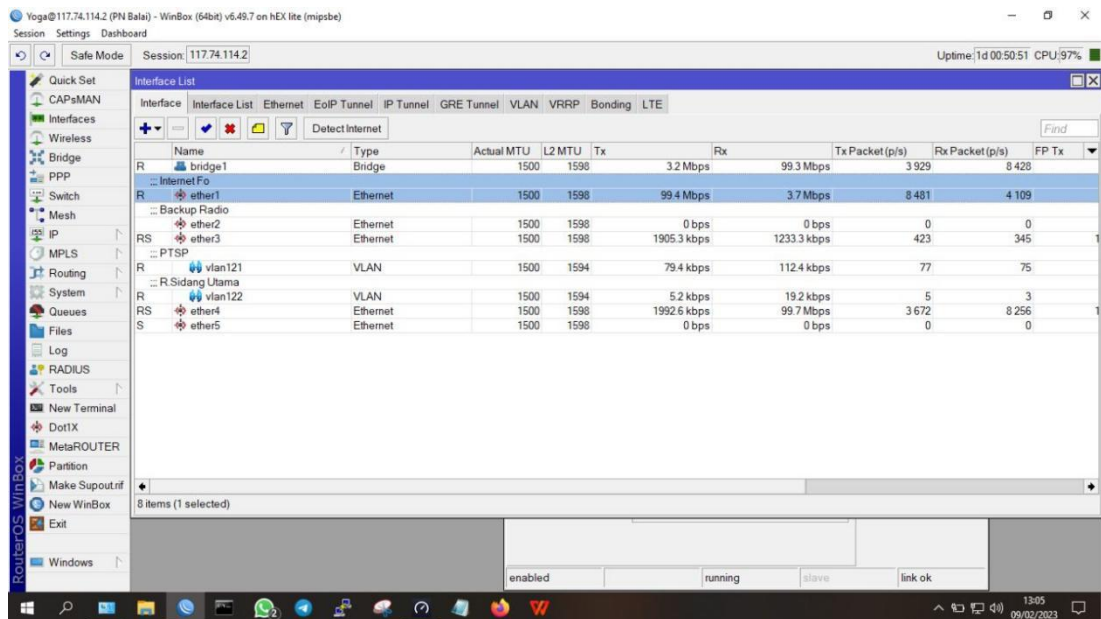
Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2023 dengan menggandeng pihak ketiga sebagai penyedia jasa yaitu Sriwijaya Internet Service (SIS) dengan spesifikasi layanan antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1 dengan *Bandwidth* sebesar 100 Mbps. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga mendapat pengadaan laptop bagi hakim dan sewa mesin fotokopi guna mendukung *E-Court*.



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface with the 'Interface List' window open. The table displays the following data:

Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx
R bridge1	Bridge	1500	1598	94.9 Mbps	2.5 Mbps	8 059	3 198	
R Internet Fo								
R ether1	Ethernet	1500	1598	3.0 Mbps	99.4 Mbps	3 455	8 601	
Backup Radio								
R ether2	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	
R ether3	Ethernet	1500	1598	6.2 Mbps	1668.6 kbps	911	564	
PTSP								
R vlan121	VLAN	1500	1594	3.2 Mbps	262.6 kbps	428	196	
R Sidang Utama								
R vlan122	VLAN	1500	1594	266.0 kbps	280.2 kbps	71	89	
R ether4	Ethernet	1500	1598	92.9 Mbps	1497.6 kbps	7 662	2 908	
S ether5	Ethernet	1500	1598	0 bps	0 bps	0	0	

Gambar 4. 1 Test Mbps Melalui Mikrotik



Gambar 4. 2 Test Mbps Melalui Mikrotik

### Test Mbps melalui Mikrotik - Dukungan Teknologi Informasi

Tabel 4. 7 Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	Dedicated 1:1 100 Mbps, Fiber
2	Penyedia Jasa	1	SIS (Sriwijaya Internet Service)
3	Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
4.	Rak Server	2	1 (satu) Server Utama, 1 (satu) Server cadangan
5.	UPS	1	Server SIPP & perangkat komputer lainnya
6.	Komputer Jaringan Lainnya	2	
7.	Router	3	
8.	Hub	1	
9.	Network Cable Tester	1	

## 1. Implementasi E-Court

Penerapan Electronic Court atau sering dikenal dengan istilah *E-Court* pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah diterapkan. Hal tersebut merupakan wujud dari komitmen bersama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mensukseskan program Mahkamah Agung RI. Pada tahun 2023 perkara yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Implementasi E-Court

No	Uraian	Daftar Melalui E-Court	Sepakat E-Court
1.	Gugatan/ Perlawanan/ Bantahan	37	36
2.	Permohonan	25	24
3.	Gugatan Sederhana	22	22

## 2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Ditahun 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengalami peningkatan katagori perkara dari yang semula

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Muara Enim	150.79	548.88	101.94	186.66	988.27
2	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	151.75	547.07	120.83	168.00	987.65
3	501-1000	IB	Pengadilan Negeri Kayuagung	150.65	548.53	101.99	165.52	986.69
4	1001-2000	IB	Pengadilan Negeri Baturaja	145.81	550.25	101.93	186.58	984.57
5	501-1000	II	Pengadilan Negeri Lahat	150.31	543.42	101.97	187.15	982.85
6	1-500	II	Pengadilan Negeri Prabumulih	148.40	543.57	102.00	188.00	981.97
7	501-1000	II	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	144.59	546.95	101.93	187.13	980.60
8	>2000	IA Khusus	Pengadilan Negeri Palembang	147.75	538.71	120.96	169.30	978.72
9	1-500	II	Pengadilan Negeri Pagar Alam	151.45	531.76	93.95	184.43	961.59
10	1001-2000	IB	Pengadilan Negeri Sekayu	145.73	539.98	93.95	180.67	960.33

1-500 perkara saat ini masuk kategori 501-1000 perkara.

Gambar 4. 3 Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

Periode Januari s/d Desember 2023

Untuk periode Januari sampai dengan Desember 2023 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada di peringkat ke-7 dengan point 980,60

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501-1000	II	Pengadilan Negeri Lahat	150.31	543.42	101.97	187.15	982.85
2	1-500	II	Pengadilan Negeri Prabumulih	148.40	543.57	102.00	188.00	981.97
3	501-1000	II	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	144.59	546.95	101.93	187.13	980.60
4	1-500	II	Pengadilan Negeri Pagar Alam	151.45	531.76	93.95	184.43	961.59

Gambar 4. 4 Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri

Periode Januari s/d Desember 2023

Kategori Kelas II Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang

Untuk kategori kelas II wilayah Pengadilan Tinggi Palembang, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berada di peringkat ke-3 dengan nilai 980,60.

Untuk versi SIPP yang dipakai terhitung Desember 2023 sudah yang paling mutakhir atau yang terbaru dari Badilum yaitu versi 5.3.1.



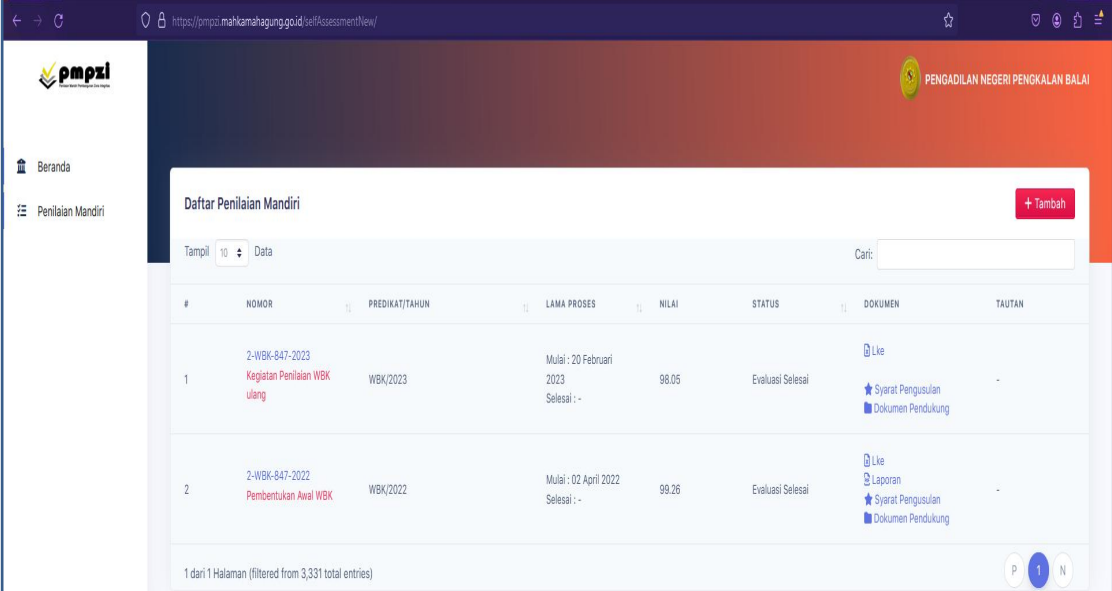
## BAB V

### PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa program yang dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

#### A. Pembangunan Zona Integeritas

Tahun 2023, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai ikut serta dalam penilaian PMPZI dalam hal WBK (Wilayah bebas Korupsi) yang mana seluruh evident telah di upload kedalam aplikasi [pmpzi.mahkamahagung.go.id](https://pmpzi.mahkamahagung.go.id). Untuk periode 2023, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memperoleh nilai sebesar 98,05



The screenshot displays the 'Daftar Penilaian Mandiri' (Self-Assessment List) page in the PMPZI application. The page features a sidebar with 'Beranda' and 'Penilaian Mandiri' options. The main content area shows a table with columns for '#', 'NOMOR', 'PREDIKAT/TAHUN', 'LAMA PROSES', 'NILAI', 'STATUS', 'DOKUMEN', and 'TAUTAN'. Two entries are visible:

#	NOMOR	PREDIKAT/TAHUN	LAMA PROSES	NILAI	STATUS	DOKUMEN	TAUTAN
1	2-WBK-847-2023 Kegiatan Penilaian WBK ulang	WBK/2023	Mulai: 20 Februari 2023 Selesai: -	98.05	Evaluasi Selesai	Like Syarat Pengusulan Dokumen Pendukung	-
2	2-WBK-847-2022 Pembentukan Awal WBK	WBK/2022	Mulai: 02 April 2022 Selesai: -	99.26	Evaluasi Selesai	Like Laporan Syarat Pengusulan Dokumen Pendukung	-

At the bottom of the table, it indicates '1 dari 1 Halaman (filtered from 3,331 total entries)' and includes pagination controls (P, 1, N).

Gambar 5. 1 Nilai Evaluasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada Aplikasi PMPZI

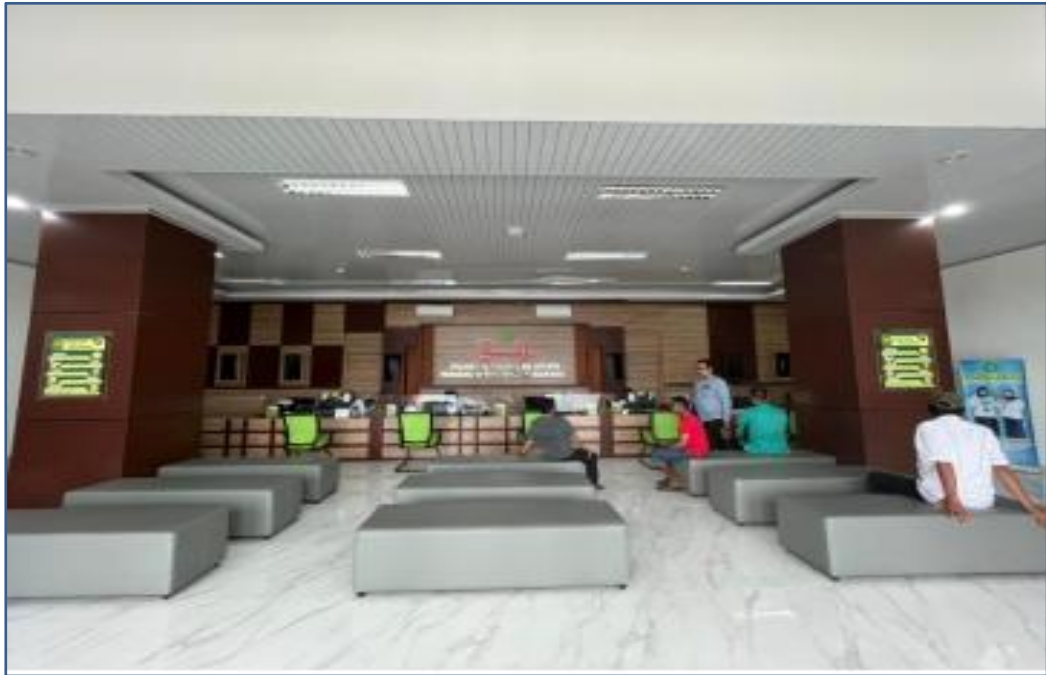
## **B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya bulan November 2018. PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Tujuan dari PTSP ini adalah mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang terdiri dari 4 (empat) layanan : layanan umum dan keuangan, pidana, perdata, dan hukum. Selain itu pada PTSP juga terdapat layanan meja informasi dan pengaduan, serta layanan pojok e-court. PTSP pada meja umum dan keuangan bertugas menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan dikeluarkan kesekretariatan. PTSP pada meja kepaniteraan perdata bertugas menerima pendaftaran perkara baik permohonan, gugatan maupun gugatan sederhana tingkat pertama, banding atau kasasi dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan perdata. PTSP pada meja kepaniteraan pidana bertugas menerima pelimpahan perkara pidana, pendaftaran perkara pidana, permohonan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/pemusnahan barang bukti/perpanjangan penahanan/pembantaran dan menyerahkan permohonan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana. PTSP pada meja

kepaniteraan hukum bertugas menerima permohonan pendaftaran pendirian CV/waarmaking surat-surat, pendaftaran surat kuasa/legalisasi surat, permohonan keterangan data perkara, permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara, layananan pengaduan SIWAS MARI dan layanan-layanan lain yang berhubungan dengan kepaniteraan hukum. PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut :

1. Meja Informasi dan Pengaduan
2. Meja layanan PTSP (Umum, Pidana, Perdata, Hukum)
3. Meja Inzage
4. Kursi pengguna layanan PTSP
5. Mesin antrian pengunjung
6. Kios-K touchscreen untuk aplikasi e-court dan eraterang
7. Air mineral untuk pengunjung
8. Brosur-brosur produk layanan PTSP
9. Kotak saran dan pengaduan
10. Banner dan pamflet informasi Pengadilan
11. Meja untuk menulis bagi pengguna layanan PTSP
12. Mesin EDC ( Bank BRI)
13. Kamera pengawas (CCTV)
14. PC untuk Survey Kepuasan Masyarakat dan Survey Persepsi Korupsi secara elektronik
15. PC dan printer scanner pada masing-masing meja pelayanan.
16. Jalur khusus bagi penyandang disabilitas
17. Kursi roda bagi penyandang disabilitas



*Gambar 5. 2 Meja PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*



*Gambar 5. 4 Komputer Survei*



*Gambar 5. 3 Kursi Tamu Terbuka*

PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai juga memiliki alat survey indeks kepuasan masyarakat dan survey indeks persepsi anti korupsi juga terdapat mesin antrian pelayanan. Terdapat ruang tamu terbuka bagi para pihak dan layanan posbakum untuk konsultasi hukum bagi para pencari keadilan.



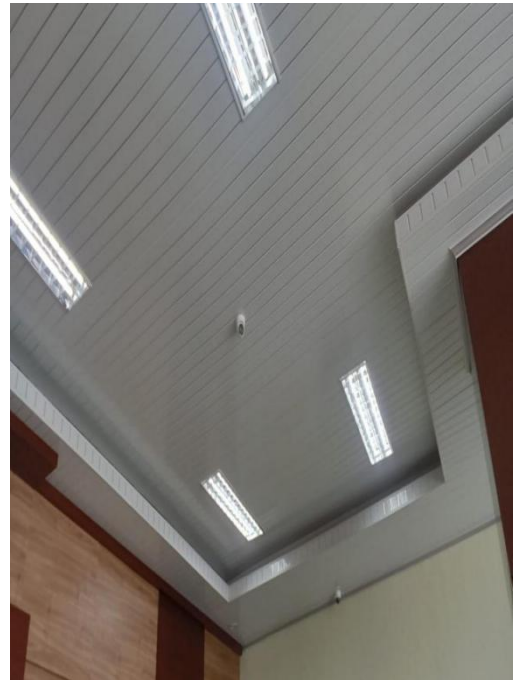
*Gambar 5. 5 Meja Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*



*Gambar 5. 6 Jalur Difable*



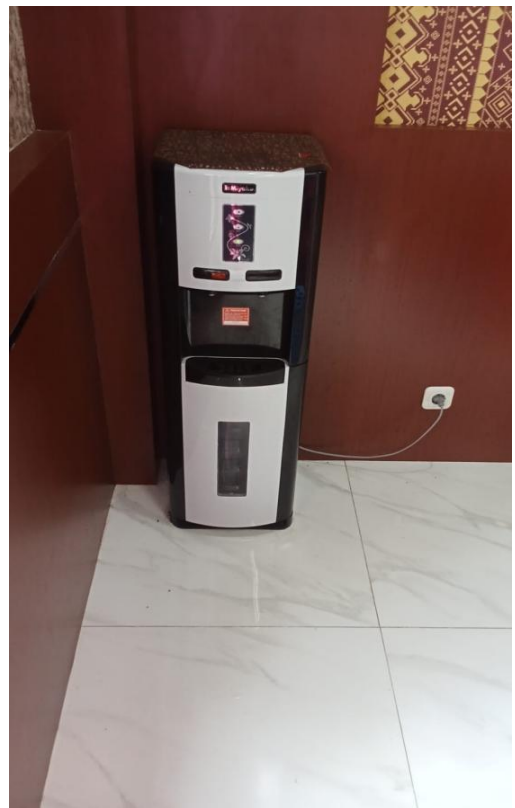
Gambar 5. 8 Kursi Roda



Gambar 5. 7 CCTV



Gambar 5. 10 Spanduk



Gambar 5. 9 Dispenser



### C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai melakukan beberapa inovasi. Adapun beberapa inovasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Astasikum (Asisten Konsultasi Hukum) yang mana memudahkan para pencari keadilan untuk berkonsultasi hukum secara gratis melalui layanan telephone



Gambar 5. 11 Astasikum

- b. Dilsah (Pengadilan Masuk Desa dan kelurahan) adalah suatu gerakan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk mensosialisasikan terkait informasi dan layanan hukum lainnya bagi masyarakat di desa dan kelurahan untuk area Banyuasin
- c. Betuah (Berbincang Topik Seputar Hukum) adalah salah satu bentuk gerakan atau layanan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam mensosialisasikan informasi atau topik seputar

hukum yang mana dalam inovasi ini menggandeng stasiun pemancar radio lokal Kabupaten Banyuasin

- d. Siperkum (Informasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum) berisi edukasi mengenai hukum terkait dengan perlindungan dan hak perempuan) yang mana di posting kedalam youtube



Gambar 5. 12 Vidio Siperkum pada Youtube

- e. SIAP MPP OPI MALL merupakan sarana informasi seputar pelayanan Pengadilan yang mana menggandeng pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai penyedia tempat (lokasi di OPI MALL Banyuasin)



Gambar 5. 13 Spanduk SIAP pada Sosial Media



- f. DILLAN (Pengadilan Masuk Sekolah dan Pesantren) merupakan suatu gerakan untuk menedukasi siswa siswi sekolah dan pesantren di wilayah Banyuwasin
- g. VILADIFA (Vidio Layanan Difabel) merupakan informasi hukum yang di posting pada youtube menggunakan bahasa isyarat;



Gambar 5. 14 Vidio Viladifa pada Youtube

- h. KISSMI (Kisah Inspiratif Kami) dilaksanakan setiap habis apel Senin Pagi, dimana secara bergilir para aparatur pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menceritakan pengalaman pribadi mereka yg menginspirasi;



Gambar 5. 15 Kegiatan KISSMI

## **BAB VI PENGAWASAN**

Dasar pengawasan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berpedoman kepada ;

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
2. Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (edisi revisi 2007);
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.

Terdapat 2 jenis pengawasan yakni ;

A. Pengawasan Melekat;

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan;

B. Pengawasan Fungsional;

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menerbitkan surat keputusan Nomor : W6-U10/6/KP.04.6/I/2023 Tanggal : 2 Januari 2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan

Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 6. 1 Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL . RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	FITRI AGUSTINA,S.H NIP.19790825 200602 2 002	PEMBINA/ (IV/a)	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2	HARI MUKTIYONO, S.H NIP. 19890901 201712 1 007	PENATA MUDA TK. I /(III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM
3	SYARIFAH YANA, S.H. NIP. 19870115 201712 2 001	PEANATA MUDA Tk. I (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
4	AGEWINA, S.H. NIP. 19880521 201712 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
5	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H. NIP. 19930604 201712 2 002	PENATA MUDA Tk. I(III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA

6	ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H NIP. 19900220 201712 2 006	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM DAN KEUANGAN 2. HAKIM PENGAWAS PTSP
---	---	------------------------------	---

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada setiap bidang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
  - a. Program kerja;
  - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
  - c. Pengawasan dan Pembinaan;
  - d. Kendala dan hambatan;
  - e. Faktor-faktor pendukung;
  - f. Evaluasi kegiatan.

## 2. Administrasi Perkara

- a. Prosedur penerimaan perkara;
- b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
- c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
- d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
- e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
- f. Keuangan perkara;
- g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
- h. Pelaporan;

## 3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan

- a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
- b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
- c. Minutasi perkara;
- d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).

## 4. Administrasi Umum

- a. Kepegawaian;
- b. Keuangan;
- c. Inventaris;
- d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.

## 5. Kinerja Pelayanan Publik

- a. Pengelolaan manajemen;
- b. Mekanisme pengawasan;
- c. Kepemimpinan;
- d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;

- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
- g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
- h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2023 terdapat berbagai temuan, selanjutnya dari temuan tersebut dilakukan klarifikasi oleh pimpinan terhadap objek pengawasan. Berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

## **B. EVALUASI**

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

*Gambar 6. 1 Rapat evaluasi hakim pengawas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai*





## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada secara maksimal
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

### **B. REKOMENDASI**

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja;
2. Dengan volume perkara dan pekerjaan yang terus meningkat diharapkan adanya penambahan Hakim, Pegawai dan khusus Tenaga Honorer dibidang pengamanan yang mana selama ini seringkali dibantu oleh pemerintah setempat dalam hal ini Pemda Banyuasin;



3. Agar dilakukan pelatihan serta pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh aparatur baik teknis maupun non teknis yang bersumber dari Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Korwil, Dirjen, Mahkamah Agung maupun menggandeng pihak instansi luar baik pemerintah maupun swasta sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.

# LAMPPIRAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**

Jl. Jenderal Sudirman Km. 3,5 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang  
Sumatera Selatan 30127, [www.pt-palembang.go.id](http://www.pt-palembang.go.id), [info@pt-palembang.go.id](mailto:info@pt-palembang.go.id)

Nomor : <sup>4286</sup> KPT.W6-U/OT1.6/XII/2023 27 Desember 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Tahun 2023

**Yth. Ketua Pengadilan Negeri**  
**Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang**  
di -  
Tempat

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Pada Bagian Ketiga (Prosuder Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dengan ini dihimbau kepada seluruh Satuan Kerja Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang untuk menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan *outline* terlampir;
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 diserahkan kepada Pengadilan Tinggi Palembang dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui email [renprog.ang.ptplg@gmail.com](mailto:renprog.ang.ptplg@gmail.com) paling lambat tanggal 16 Januari 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
KETUA,  
  
MOH. EKA KARTIKA EM.

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

Lampiran I  
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2024  
Tanggal: 19 Desember 2023

## **OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM/AGAMA/  
MILTUN

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO  
PENGADILAN)

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/  
PENDIDIKAN

A. Mutasi

B. Promosi

C. Pensiun

D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

C. Pengelolaan Teknologi Informasi



BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Akreditasi Penjaminan Mutu
- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- C. Inovasi Pelayanan Publik

BAB VI PENGAWASAN

- A. Internal
- B. Evaluasi

BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Catatan: Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satker masing-masing





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553  
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023 Jakarta, 19 Desember 2023  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Tahun 2023

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:  
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
dan Tingkat Pertama pada Empat Lingkungan Peradilan  
di tempat

Dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *accountability* untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisiensi dan efektif, maka setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan harus dilaporkan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan). Dihimbau kepada para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Unit Eselon I Mahkamah Agung Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Unit Eselon II di Bawahnya;
2. Pengadilan Tingkat Banding Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari masing-masing Pengadilan Tingkat Pertama di Bawahnya;
3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 sesuai dengan *outline* terlampir;



4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 diserahkan kepada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dalam bentuk *softcopy* melalui link [https://bit.ly/Laporan\\_Pelaksanaan\\_Kegiatan\\_Tahun\\_2023](https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023) paling lambat tanggal 16 Februari 2024.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI



Sugiyanto

Tembusan:  
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi



Lampiran I  
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023  
Tanggal: 19 Desember 2023

## **OUTLINE LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM/AGAMA/  
MILTUN

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama
- Keadaan Perkara Tingkat Banding
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/  
PENDIDIKAN

- A. Mutasi
- B. Promisi
- C. Pensiun
- D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

- A. Pengelolaan Keuangan
- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
- C. Pengelolaan Teknologi Informasi





## BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- A. Pembangunan Zona Integritas
- B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- C. Inovasi Pelayanan Publik

## BAB VI PENGAWASAN

- A. Internal
- B. Evaluasi

## BAB VII PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Catatan: Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan satker masing-masing



Lampiran II  
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Nomor : 4108/SEK/OT1.6/12/2023  
Tanggal: 19 Desember 2023

### JADWAL PENYERAHAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	Januari Minggu Ketiga	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unit Eselon II menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> ke Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;</li><li>- Pengadilan Tingkat Pertama menyerahkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dalam bentuk <i>hardcopy</i> atau <i>softcopy</i> ke Pengadilan Tingkat Banding.</li></ul>
2	Januari Minggu Keempat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unit Eselon I mengkompilasi laporan-laporan dari masing-masing Unit Eselon II;</li><li>- Pengadilan Tingkat Banding mengkompilasi laporan-laporan dari Pengadilan Tingkat Pertama di Bawahnya.</li></ul>
3	Februari Minggu Pertama	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seluruh Unit Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung mengirim Laporan Pelaksanaan Kegiatan Unit Eselon I yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi dalam bentuk <i>softcopy</i> melalui link <a href="https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023">https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023</a>;</li><li>- Pengadilan Tingkat Banding mengirimkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah dikompilasi ke Badan Urusan Administrasi dalam bentuk <i>softcopy</i> melalui link <a href="https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023">https://bit.ly/Laporan_Pelaksanaan_Kegiatan_Tahun_2023</a>;</li></ul>





**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

NOMOR : 1/KPN.W6-U10/SK.PW1.2/I/2024

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

- Menimbang : a. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan laporan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. Bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu dilakukan perubahan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terdiri dari Pembina, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota;
- d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkajene-Andemone Islands.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;



2. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

- KETIGA : Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Tahunan (LAPTAH), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai bertugas menghimpun bahan-bahan tersebut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada tanggal : 2 Januari 2024  
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

  
  
**NOTITADEWI WAHYUNI**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN  
BALAI  
Nomor : 1/KPN.W6-U10/SK.PW1.2/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	<b>NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.</b> NIP. 197811252002122002	Ketua	Pembina	
2.	<b>WARNO, S.H.</b> NIP. 196709041991031002	Panitera	Ketua Tim	
3.	<b>ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.</b> NIP. 197612032011011005	Sekretaris	Sekretaris	
4.	<b>A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.</b> NIP. 197007251990031001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
5.	<b>KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.</b> NIP. 197909142005021001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
6.	<b>ARIF B. J. ANUGRAH, S.H., M.H.</b> NIP. 199005022009121003	Penata (III/c)	Anggota	
7.	<b>M. IMAN SEPTIAN, S.IP.</b> NIP. 198509212011011011	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
8.	<b>RAHMAT JUNIANSYAH</b> NIP. 197506201994031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota	
9.	<b>MUTIARA SAPUTRI</b> NIP. 199603222019032007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota	

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN  
BALAI,

  
  
NOFITA DWI WAHYUNI



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NEGERI PANGKALAN BALAI  
NOMOR : W6-U10/6/KP.04.6/1/2023**

**TENTANG  
PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN  
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**Menimbang** : a. Untuk Kelancaran dan terkontrol nya Administrasi kantor Bahwa perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;  
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1974 Tentang Pokok-  
2. Pokok Kepegawaian;  
3. Undang-Undang Nomor : 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;  
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 02 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;  
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun  
5. 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;  
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;  
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

**Pertama** : Menetapkan Susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang baru, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;

**Kedua** : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

- Ketiga** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;
- Kelima** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai  
Pada tanggal : 2 Januari 2023



**KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.**  
NID. 19781125 200212 2 002



**DAFTAR LAMPIRAN****NOMOR : W6-U10/6/KP.04.6/II/2023****TANGGAL : 2 Januari 2023****PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN  
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>PANGKAT/ GOL. RUANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	2.	3.	4.
1.	<b>FITRI AGUSTINA, S.H.</b> NIP. 19790825 200602 2 002	PEMBINA / (IV/a)	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	<b>HARI MUKTIYONO, S.H.</b> NIP. 19890901 201712 1 007	PENATA MUDA TK. I / (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM
3.	<b>SYARIFA YANA, S.H.</b> NIP. 19870115 201712 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA
4.	<b>AGEWINA, S.H.</b> NIP. 19880521 201712 2 001	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
5.	<b>AYU CAHYANI SIRAIT, S.H.</b> NIP. 19930604 201712 2 002	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPEGAWAIAN DAN ORTALA
6.	<b>ERWIN TRI SURYA ANANDAR, S.H.</b> NIP. 19900220 201712 1 006	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN 2. HAKIM PENGAWAS PTSP

**KETUA****PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI****NOFITA DWI WAHYUNI, S.H., M.H.**

NIP. 19781125 200212 2 002



**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

NOMOR : 143/KPN.W6-U10/SK.TI1/XI/2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

- Menimbang : a. Berdasarkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan;
- b. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan
- c. Bahwa perlu ditetapkan Koordinator dan Tim SIPP, di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang transparan seperti tersebut dalam pertimbangan angka 1 dan 2;
- d. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas diatas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

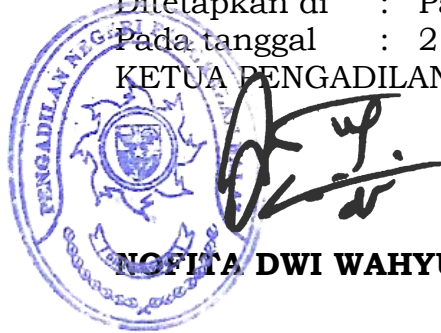
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : W6-U10/27/KP.04.6/I/2023 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 02 Januari 2023;

- KEDUA : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Mengenai penunjukan koordinator dan petugas ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 21 November 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

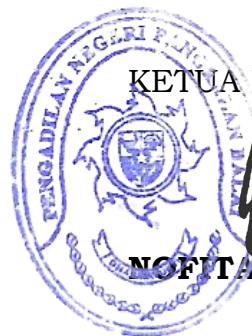


**NOFITA DWI WAHYUNI**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
Nomor : 143/KPN.W6-U10/SK.T11/XI/2023  
Tanggal : 21 November 2023

**PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN  
PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
<b>TIM KAJIAN</b>			
1.	<b>AGEWINA, S.H., M.H.</b> NIP. 198805212017122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
2.	<b>ERWIN T. S. ANANDAR, S.H., M.H.</b> NIP. 199002202017121006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
<b>TIM TEKNIS</b>			
1.	<b>M. IMAN SEPTIAN, S.IP.</b> NIP. 19850921 201101 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
2.	<b>MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.</b> NIP. 198804022014031001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
3.	<b>WAHIDA SOPHIE HIDAYANTI, S.H.</b> NIP. 199905022022032013	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan
4.	<b>MAHMUDAH, A.Md.A.B.</b> NIPPPK. 199810132023212007	VII	Arsiparis Pelaksana/Terampil



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

**NOFITA DWI WAHYUNI**

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 10,932,172,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			10,932,172,000	
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5,143,558,000	
1066.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,143,558,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1066.EBA.962	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Umum	1.0 Laporan		4,446,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			4,446,000	
C	Inventaris Perkantoran CPNS			4,446,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu )			4,446,000	RM
	- Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) [2 ORG x 1 THN]	2.0 OT	2,223,000	4,446,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,139,112,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu )			1,454,678,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	121,071,600	121,071,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,212,536,060	1,212,536,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu )			38,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	34,341	34,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,400	2,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu )			100,174,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	85,782,074	85,782,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,196,400	7,196,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,196,000	7,196,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu )			28,683,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	24,063,254	24,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,310,000	2,310,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 10,932,172,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			28,944,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,412,000	2,412,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,259,218,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	78,684,000	78,684,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,101,850,000	1,101,850,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			182,814,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	158,374,312	158,374,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	12,220,800	12,220,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			129,645,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	6,540,000	6,540,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,439,129,000</b>	
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>464,252,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			436,922,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
	- KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	1.0 THN	75,665,804	75,665,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu )			27,330,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai 30 orang)	30.0 OB	911,000	27,330,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 10,932,172,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>B</i>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			222,630,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			189,000,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG]	1.0 THN	3,000,000	3,000,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			11,630,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	969,167	11,630,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu )			12,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu )			6,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	500,000	6,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu )			4,000,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000	
<i>C</i>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			457,135,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu )			272,064,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	109,000	272,064,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu )			185,071,000	RM
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	18,000,000	18,000,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	20,000,000	20,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	25,000,000	75,000,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
<i>D</i>	<i>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			100,132,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			28,216,000	RM
	- Seragam Dinas CPNS [2 CPNS x 2 STEL]	4.0 STEL	804,000	3,216,000	
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 10,932,172,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu )			71,916,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,547,000	18,564,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	880,000	10,560,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,596,000	19,152,000	
<i>E</i>	<i>Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc</i>			136,080,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu )			136,080,000	
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [9 ORG x 12 BLN]	108.0 OB	1,260,000	136,080,000	
<i>H</i>	<i>Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding</i>			45,900,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu )			45,900,000	
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	200,000	5,600,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,000	24,000,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	200,000	8,000,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	207,500	8,300,000	
<i>I</i>	<i>Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL</i>			8,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu )			8,000,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	300,000	6,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	100,000	1,000,000	
<i>J</i>	<i>Penanganan Pandemi COVID-19</i>			5,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu )			5,000,000	RM
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	5,000,000	5,000,000	
1071	<u>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</u>			5,788,614,000	RM
1071.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	1.0 Unit, m2, Paket		5,788,614,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1071.EBB.971	<u>Layanan Prasarana Internal</u>	1.0 m2		5,788,614,000	RM
051	<u>Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan</u>			5,788,614,000	
A	<i>Lanjutan Sarling Kantor</i>			5,788,614,000	



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 10,932,172,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu )			5,788,614,000	RM
	- Fisik	1.0 Keg	5,010,614,000	5,010,614,000	
	- Perencana	1.0 Keg	101,000,000	101,000,000	
	- Pengawas	1.0 Keg	510,000,000	510,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 Keg	167,000,000	167,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 15 Januari 2024



Sekretaris

*Andrianto*

**ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom**

NIP 197612032011011005

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REV-11)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 11,752,414,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 1066 1066.EBA	Program Dukungan Manajemen Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi  Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]			11,752,414,000 5,113,318,000 5,113,318,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1066.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Laporan		4,446,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah			4,446,000	
C	Inventaris Perkantoran CPNS			4,446,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu )			4,446,000	RM
	- Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi) [2 ORG x 1 THN]	2.0 OT	2,223,000	4,446,000	
1066.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,108,872,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			3,699,983,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu )			1,545,686,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	113,178,160	113,178,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	113,004,700	113,004,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,319,504,820	1,319,504,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu )			47,000	RM
	- Belanja pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	38,341	38,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,400	2,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu )			110,939,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	95,425,530	95,425,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,680,360	7,680,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,834,850	7,834,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu )			31,531,000	RM
	- Belanja Tunj. anak PNS	1.0 THN	27,063,000	27,063,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,198,930	2,198,000	
	- Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,270,438	2,270,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REV-11)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 11,752,414,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			28,020,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1.0 THN	24,000,000	24,000,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,176,090,000	RM
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	83,370,000	83,370,000	
	- Belanja Tunj Fungsional PNS	1.0 THN	1,009,350,000	1,009,350,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			156,114,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1.0 THN	124,638,000	124,638,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	15,751,286	15,751,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	15,725,030	15,725,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			93,812,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1.0 THN	93,812,616	93,812,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			421,977,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,600	421,977,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu )			120,395,000	RM
	- Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,005,000	2,005,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,825,000	1,825,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	116,565,000	116,565,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu )			10,589,000	RM
	- Gaji Pokok PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	2,647,290	10,589,000	
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,000	RM
	- Pembulatan Gaji PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	60	1,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,400,000	RM
	- Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	350,000	1,400,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu )			302,000	RM
	- Tunjangan Beras PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	75,500	302,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REV-11)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 11,752,414,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu )			3,080,000	RM
	- Uang Makan PPPK [1 ORG x 4 BLN]	4.0 BLN	770,000	3,080,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,408,889,000</b>	
<b>A</b>	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			<i>469,306,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			436,922,000	RM
	- Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	3,683,000	44,196,000	
	- Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	3,683,000	88,392,000	
	- Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,348,000	200,880,000	
	- THR Sopir [1 ORG x 1 BLN]	1.0 OB	3,683,000	3,683,000	
	- THR Satpam [2 ORG x 1 BLN]	2.0 OB	3,683,000	7,366,000	
	- THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	5.0 OB	3,348,000	16,740,000	
	- KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	1.0 THN	75,665,804	75,665,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu )			32,384,000	RM
	- Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai 30 orang)	30.0 OB	1,079,467	32,384,000	
<b>B</b>	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>202,900,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			188,800,000	RM
	- Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG]	1.0 THN	2,800,039	2,800,000	
	- Langganan Internet	12.0 BLN	15,500,000	186,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			1,000,000	RM
	- Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	83,334	1,000,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu )			5,000,000	RM
	- Langganan telpon	12.0 BLN	416,667	5,000,000	
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu )			5,000,000	RM
	- Langganan Air	12.0 BLN	416,667	5,000,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu )			3,100,000	RM
	- Langganan Web Hosting	1.0 THN	3,100,000	3,100,000	
<b>C</b>	<i>Pemeliharaan Kantor</i>			<i>476,137,000</i>	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu )			267,079,000	RM
	- Pemeliharaan gedung dan Bangunan	2496.0 M2	107,003	267,079,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REV-11)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (01) Badan Urusan Administrasi  
**UNIT KERJA** (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 11,752,414,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu )			209,058,000	RM
	- Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	6.0 Unit	960,150	5,760,000	
	- Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	65.0 Unit	692,640	45,021,000	
	- BBM Sewa Roda 4	1.0 UT	21,500,000	21,500,000	
	- Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat) [1 UNIT x 1 THN]	1.0 UT	29,987,000	29,987,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN]	2.0 UT	3,000,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	3.0 UNIT	28,500,000	85,500,000	
	- Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN]	20.0 UT	219,000	4,380,000	
	- Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN]	4.0 UT	690,000	2,760,000	
	- Perawatan AC [6 Unit x 1 THN]	6.0 UT	750,000	4,500,000	
	- Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	5.0 UT	730,000	3,650,000	
D	<u>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</u>			100,132,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu )			28,216,000	RM
	- Seragam Dinas CPNS [2 CPNS x 2 STEL]	4.0 STEL	804,000	3,216,000	
	- Pakaian Dinas Honorer/pegawai tidak tetap [8 ORG x 1 STEL]	8.0 STEL	500,000	4,000,000	
	- Pakaian Dinas Pegawai [35 ORG x 1 STEL]	35.0 STEL	600,000	21,000,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu )			71,916,000	RM
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,547,000	18,564,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNPB [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	450,000	10,800,000	
	- Honorarium Bendahara [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	770,000	9,240,000	
	- Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	880,000	10,560,000	
	- Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,596,000	19,152,000	
E	<u>Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc</u>			105,840,000	
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu )			105,840,000	RM
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas [7 ORG x 12 BLN]	84.0 OB	1,260,000	105,840,000	
H	<u>Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding</u>			46,554,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.160-Sekayu )			46,554,000	RM
	- Swab [4 ORG x 7 KEG]	28.0 OK	358	10,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	485,800	38,864,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	175,000	7,000,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	17,000	680,000	
I	<u>Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL</u>			8,010,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REV-11)**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (01) Badan Urusan Administrasi  
 UNIT KERJA (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 11,752,414,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.160-Sekayu )			8,010,000	RM
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KEG]	10.0 OK	100,000	1,000,000	
	- Uang Harian [2 ORG x 2 HARI x 5 KEG]	20.0 OH	350,000	7,000,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 5 KEG]	10.0 OH	1,000	10,000	
J	Penanganan Pandemi COVID-19			10,000	
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.160-Sekayu )			10,000	RM
	- Penyemprotan Disinfektan	1.0 KEG	10,000	10,000	
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung			6,639,096,000	
1071.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	2.0 Unit, m2, Paket		6,639,096,000	
-----					
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1071.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1.0 Unit		850,482,000	
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			850,482,000	
A	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			850,482,000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu )			850,482,000	RM
	- Genset 200 kVA	1.0 Unit	850,482,000	850,482,000	
1071.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	1.0 m2		5,788,614,000	
051	Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan			5,788,614,000	
A	Lanjutan Sarling Kantor			5,788,614,000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu )			5,788,614,000	RM
	- Fisik	1.0 Keg	5,010,614,000	5,010,614,000	
	- Perencana	1.0 Keg	101,000,000	101,000,000	
	- Pengawas	1.0 Keg	510,000,000	510,000,000	
	- Pengelola Kegiatan	1.0 Keg	167,000,000	167,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 15 Januari 2024

Sekretaris



**ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom**

NIP 197612032011011005

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
**UNIT KERJA** (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 187,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			187,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			187,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	420.0 Perkara, Berkas Perkara		163,800,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.0 Perkara		163,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			79,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			79,800,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu )			25,200,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	60,000	25,200,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu )			54,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	420.0 PKR	130,000	54,600,000	
052	Penetapan hari sidang			24,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,600,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			24,600,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	82,000	24,600,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			13,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			13,800,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			1,800,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	30,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			12,000,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	80,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			17,500,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			17,500,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			1,500,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	30,000	1,500,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			16,000,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	80,000	16,000,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			23,100,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			23,100,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (DIPA AWAL)**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 187,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.160-Sekayu )			23,100,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	55,000	23,100,000	
<b>057</b>	<b>Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>3,800,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			3,800,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			600,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 PKR	30,000	600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.160-Sekayu )			3,200,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
<b>058</b>	<b>Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>1,200,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	80,000	400,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.160-Sekayu )			800,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 PKR	80,000	400,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 PKR	80,000	400,000	
1049.QBA	<u>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]</u>	33.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. BANYUASIN <b>Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum</b>	33.0 Orang		24,000,000	
<b>051</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>			<b>24,000,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.160-Sekayu )			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 JL	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 15 Januari 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN

  
**ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom**  
 NIP 197612032011011005



**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REVISI KE-7)**

**KEMEN/LEMB** (005) MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT ORG** (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
**UNIT KERJA** (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
**ALOKASI** Rp. 167,800,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			167,800,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			167,800,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	420.0 Perkara, Berkas Perkara		143,800,000	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
1049.BCA.U03	Lokasi : KAB. BANYUASIN Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.0 Perkara		143,800,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			66,405,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			66,405,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu )			8,805,000	RM
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	20,965	8,805,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (KPPN.160-Sekayu )			57,600,000	RM
	- Alat Tulis Kantor	420.0 PKR	137,143	57,600,000	
052	Penetapan hari sidang			50,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			50,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			50,000	RM
	- Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksaan)	300.0 OK	167	50,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			23,740,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			23,740,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			2,400,000	RM
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			21,340,000	RM
	- Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	150.0 OK	142,267	21,340,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			14,080,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,080,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu )			1,800,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	50.0 OK	36,000	1,800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu )			12,280,000	RM
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	200.0 OK	61,400	12,280,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			31,800,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			31,800,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023 (REVISI KE-7)**

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG  
 UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum  
 UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI  
 ALOKASI Rp. 167,800,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.160-Sekayu )			31,800,000	
	- Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	420.0 PKR	75,715	31,800,000	
<b>057</b>	<b>Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>4,800,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			4,800,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			600,000	RM
	- Pengiriman Salinan Putusan	20.0 PKR	30,000	600,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.160-Sekayu )			4,200,000	RM
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 PKR	130,000	2,600,000	
	- Pemberitahuan Putusan Banding	20.0 PKR	80,000	1,600,000	
<b>058</b>	<b>Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>			<b>2,925,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,925,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu )			900,000	RM
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 PKR	180,000	900,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.160-Sekayu )			2,025,000	RM
	- Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	5.0 PKR	220,000	1,100,000	
	- Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 PKR	185,000	925,000	
1049.QBA	<u>Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]</u>	33.0 Orang		24,000,000	
1049.QBA.032	Lokasi : KAB. BANYUASIN <b>Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum</b>	33.0 Orang		24,000,000	
<b>051</b>	<b>Pos Bantuan Hukum</b>			<b>24,000,000</b>	<b>U</b>
A	TANPA SUB KOMPONEN			24,000,000	
522131	<u>Belanja Jasa Konsultan</u> (KPPN.160-Sekayu )			24,000,000	RM
	- Honor Advokat Piket [1 ORG x 2 Jam x 10 Hari x 12 BLN	240.0 JL	100,000	24,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

Pangkalan Balai, 15 Januari 2024

KPA-KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom**

NIP 197612032011011005

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi** : 01      **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja** : 401909      **PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Hal 1 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>11,752,414,000</b>	<b>0</b>	<b>10,916,483,014</b>	<b>329,857,004</b>	<b>11,246,340,018</b>	<b>95.69 %</b>	<b>506,073,982</b>
WA Program Dukungan Manajemen	11,752,414,000	0	10,916,483,014	329,857,004	11,246,340,018	95.69 %	506,073,982
WA.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	5,113,318,000	0	4,387,968,689	326,357,004	4,714,325,693	92.20 %	398,992,307
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>5,113,318,000</b>	<b>0</b>	<b>4,387,968,689</b>	<b>326,357,004</b>	<b>4,714,325,693</b>	<b>92.20 %</b>	<b>398,992,307</b>
<b>EBA.962 Layanan Umum</b>	<b>4,446,000</b>	<b>0</b>	<b>4,440,000</b>	<b>0</b>	<b>4,440,000</b>	<b>99.87 %</b>	<b>6,000</b>
<b>051 Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah</b>	<b>4,446,000</b>	<b>0</b>	<b>4,440,000</b>	<b>0</b>	<b>4,440,000</b>	<b>99.87 %</b>	<b>6,000</b>
051.0C Inventaris Perkantoran CPNS	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	99.87 %	6,000
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	99.87 %	6,000
000070. Pengadaan Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	4,446,000	0	4,440,000	0	4,440,000	99.87 %	6,000
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>5,108,872,000</b>	<b>0</b>	<b>4,383,528,689</b>	<b>326,357,004</b>	<b>4,709,885,693</b>	<b>92.19 %</b>	<b>398,986,307</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>3,699,983,000</b>	<b>0</b>	<b>3,112,833,143</b>	<b>239,605,504</b>	<b>3,352,438,647</b>	<b>90.61 %</b>	<b>347,544,353</b>
001.0A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3,699,983,000	0	3,112,833,143	239,605,504	3,352,438,647	90.61 %	347,544,353
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,545,686,000	0	1,440,232,380	105,245,300	1,545,477,680	99.99 %	208,320
000001. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	113,178,000	0	113,173,160	0	113,173,160	100.00	4,840
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	113,004,000	0	112,999,700	0	112,999,700	100.00	4,300
000003. Belanja Gaji Pokok PNS	1,319,504,000	0	1,214,059,520	105,245,300	1,319,304,820	99.98 %	199,180
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,000	0	23,795	1,330	25,125	53.46 %	21,875
000004. Belanja pembulatan Gaji PNS	38,000	0	19,613	1,330	20,943	55.11 %	17,057
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	7,000	0	2,210	0	2,210	31.57 %	4,790
000006. Belanja Pembulatan gaji PNS (gaji ke 14)	2,000	0	1,972	0	1,972	98.60 %	28
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	110,939,000	0	100,413,140	7,417,600	107,830,740	97.20 %	3,108,260
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	95,425,000	0	84,907,930	7,417,600	92,325,530	96.75 %	3,099,470
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri (gaji ke 13)	7,680,000	0	7,675,360	0	7,675,360	99.94 %	4,640
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7,834,000	0	7,829,850	0	7,829,850	99.95 %	4,150
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	31,531,000	0	28,387,662	2,075,012	30,462,674	96.61 %	1,068,326

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000010. Belanja Tunj. anak PNS	27,063,000	0	23,928,294	2,075,012	26,003,306	96.08 %	1,059,694
000011. Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 13)	2,198,000	0	2,193,930	0	2,193,930	99.81 %	4,070
000012. Belanja Tunj. anak PNS (gaji ke 14)	2,270,000	0	2,265,438	0	2,265,438	99.80 %	4,562
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	28,020,000	0	25,150,000	2,010,000	27,160,000	96.93 %	860,000
000013. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
000014. Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
000015. Belanja Tunj. Struktural PNS	24,000,000	0	21,130,000	2,010,000	23,140,000	96.42 %	860,000
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,176,090,000	0	1,085,745,000	83,370,000	1,169,115,000	99.41 %	6,975,000
000016. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	83,370,000	0	83,370,000	0	83,370,000	100.00	0
000017. Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	83,370,000	0	83,370,000	0	83,370,000	100.00	0
000018. Belanja Tunj Fungsional PNS	1,009,350,000	0	919,005,000	83,370,000	1,002,375,000	99.31 %	6,975,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	156,114,000	0	100,271,110	6,301,290	106,572,400	68.27 %	49,541,600
000019. Belanja Tunj. PPh PNS	124,638,000	0	68,804,794	6,301,290	75,106,084	60.26 %	49,531,916
000020. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	15,751,000	0	15,746,286	0	15,746,286	99.97 %	4,714
000021. Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	15,725,000	0	15,720,030	0	15,720,030	99.97 %	4,970
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	93,812,000	0	84,658,980	6,083,280	90,742,260	96.73 %	3,069,740
000022. Belanja Tunj. Beras PNS	93,812,000	0	84,658,980	6,083,280	90,742,260	96.73 %	3,069,740
511129 Belanja Uang Makan PNS	421,977,000	0	214,727,000	21,982,000	236,709,000	56.10 %	185,268,000
000023. Belanja Uang Makan PNS	421,977,000	0	214,727,000	21,982,000	236,709,000	56.10 %	185,268,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	120,395,000	0	22,825,000	1,280,000	24,105,000	20.02 %	96,290,000
000024. Belanja Tunj Umum PNS (gaji ke 14)	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000	100.00	0
000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,825,000	0	1,825,000	0	1,825,000	100.00	0
000026. Belanja Tunjangan Umum PNS	116,565,000	0	18,995,000	1,280,000	20,275,000	17.39 %	96,290,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	10,589,000	0	7,941,600	2,647,200	10,588,800	100.00	200
000076. Gaji Pokok PPPK	10,589,000	0	7,941,600	2,647,200	10,588,800	100.00	200
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	216	72	288	28.80 %	712

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 **MAHKAMAH AGUNG**  
**Unit Organisasi** : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**Satuan Kerja** : 401909 **PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

Hal 3 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000078. Pembulatan Gaji PPPK	1,000	0	216	72	288	28.80 %	712
511624 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,400,000	0	1,050,000	350,000	1,400,000	100.00	0
000077. Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK	1,400,000	0	1,050,000	350,000	1,400,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	302,000	0	217,260	72,420	289,680	95.92 %	12,320
000079. Tunjangan Beras PPPK	302,000	0	217,260	72,420	289,680	95.92 %	12,320
511628 Belanja Uang Makan PPPK	3,080,000	0	1,190,000	770,000	1,960,000	63.64 %	1,120,000
000080. Uang Makan PPPK	3,080,000	0	1,190,000	770,000	1,960,000	63.64 %	1,120,000
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1,408,889,000</b>	<b>0</b>	<b>1,270,695,546</b>	<b>86,751,500</b>	<b>1,357,447,046</b>	<b>96.35 %</b>	<b>51,441,954</b>
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	469,306,000	0	403,271,270	61,280,000	464,551,270	98.99 %	4,754,730
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	436,922,000	0	376,592,070	55,578,000	432,170,070	98.91 %	4,751,930
000027. Honorarium Sopir	44,196,000	0	36,830,000	7,366,000	44,196,000	100.00	0
000028. Honorarium Satpam	88,392,000	0	73,660,000	14,732,000	88,392,000	100.00	0
000029. Honorarium Pramubakti	200,880,000	0	167,400,000	33,480,000	200,880,000	100.00	0
000030. THR Sopir	3,683,000	0	3,683,000	0	3,683,000	100.00	0
000031. THR Satpam	7,366,000	0	7,366,000	0	7,366,000	100.00	0
000032. THR Pramubakti	16,740,000	0	16,740,000	0	16,740,000	100.00	0
000033. KEPERLUAN ALAT RUMAH TANGGA KANTOR	75,665,000	0	70,913,070	0	70,913,070	93.72 %	4,751,930
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	32,384,000	0	26,679,200	5,702,000	32,381,200	99.99 %	2,800
000034. Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran ( pegawai 30 orang)	32,384,000	0	26,679,200	5,702,000	32,381,200	99.99 %	2,800
002.0B Langganan Daya dan Jasa	202,900,000	0	199,470,889	77,500	199,548,389	98.35 %	3,351,611
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	188,800,000	0	188,750,039	0	188,750,039	99.97 %	49,961
000035. Lisensi Vidio Conference	2,800,000	0	2,750,039	0	2,750,039	98.22 %	49,961
000036. Langganan Internet	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000	100.00	0
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,000,000	0	995,620	0	995,620	99.56 %	4,380
000037. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1,000,000	0	995,620	0	995,620	99.56 %	4,380
522112 Belanja Langganan Telepon	5,000,000	0	2,634,230	0	2,634,230	52.68 %	2,365,770

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 4 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000038. Langganan telpon	5,000,000	0	2,634,230	0	2,634,230	52.68 %	2,365,770
522113 Belanja Langganan Air	5,000,000	0	4,016,000	77,500	4,093,500	81.87 %	906,500
000039. Langganan Air	5,000,000	0	4,016,000	77,500	4,093,500	81.87 %	906,500
522141 Belanja Sewa	3,100,000	0	3,075,000	0	3,075,000	99.19 %	25,000
000040. Langganan Web Hosting	3,100,000	0	3,075,000	0	3,075,000	99.19 %	25,000
002.0C Pemeliharaan Kantor	476,137,000	0	445,345,063	9,481,000	454,826,063	95.52 %	21,310,937
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	267,079,000	0	252,846,440	7,720,000	260,566,440	97.56 %	6,512,560
000041. Pemeliharaan gedung dan Bangunan	267,079,000	0	252,846,440	7,720,000	260,566,440	97.56 %	6,512,560
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	209,058,000	0	192,498,623	1,761,000	194,259,623	92.92 %	14,798,377
000042. Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	5,760,000	0	5,661,000	0	5,661,000	98.28 %	99,000
000043. Perawatan Laptop	3,650,000	0	1,105,000	900,000	2,005,000	54.93 %	1,645,000
000044. Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	45,021,000	0	43,428,750	0	43,428,750	96.46 %	1,592,250
000045. BBM Sewa Roda 4	21,500,000	0	19,119,700	750,000	19,869,700	92.42 %	1,630,300
000046. Pemeliharaan kendaraan roda 4 (empat)	29,987,000	0	27,293,000	0	27,293,000	91.02 %	2,694,000
000047. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua)	6,000,000	0	5,821,567	111,000	5,932,567	98.88 %	67,433
000048. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pinjam Pakai	85,500,000	0	83,054,606	0	83,054,606	97.14 %	2,445,394
000049. Perawatan Komputer	4,380,000	0	2,525,000	0	2,525,000	57.65 %	1,855,000
000050. Perawatan Printer	2,760,000	0	1,265,000	0	1,265,000	45.83 %	1,495,000
000051. Perawatan AC	4,500,000	0	3,225,000	0	3,225,000	71.67 %	1,275,000
002.0D Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	100,132,000	0	88,146,000	5,993,000	94,139,000	94.01 %	5,993,000
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	28,216,000	0	28,216,000	0	28,216,000	100.00	0
000052. Seragam Dinas CPNS	3,216,000	0	3,216,000	0	3,216,000	100.00	0
000053. Pakaian Dinas Honorar/pegawai tidak tetap	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	100.00	0
000054. Pakaian Dinas Pegawai	21,000,000	0	21,000,000	0	21,000,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	71,916,000	0	59,930,000	5,993,000	65,923,000	91.67 %	5,993,000
000055. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,564,000	0	15,470,000	1,547,000	17,017,000	91.67 %	1,547,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 5 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000056. Honorarium Pengelola Keuangan Penerimaan PNB	3,600,000	0	3,000,000	300,000	3,300,000	91.67 %	300,000
000057. Honorarium Pengelola Keuangan	10,800,000	0	9,000,000	900,000	9,900,000	91.67 %	900,000
000058. Honorarium Bendahara	9,240,000	0	7,700,000	770,000	8,470,000	91.67 %	770,000
000059. Honorarium Pejabat penguji SPP dan Penandatanganan SPM	10,560,000	0	8,800,000	880,000	9,680,000	91.67 %	880,000
000060. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran 1 ORG	19,152,000	0	15,960,000	1,596,000	17,556,000	91.67 %	1,596,000
002.0E Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim dan Hakim Ad Hoc	105,840,000	0	88,200,000	8,820,000	97,020,000	91.67 %	8,820,000
522141 Belanja Sewa	105,840,000	0	88,200,000	8,820,000	97,020,000	91.67 %	8,820,000
000061. Bantuan Sewa Rumah Dinas	105,840,000	0	88,200,000	8,820,000	97,020,000	91.67 %	8,820,000
002.0H Koordinasi Ke Pusat/Tingkat Banding	46,554,000	0	39,302,324	1,100,000	40,402,324	86.79 %	6,151,676
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46,554,000	0	39,302,324	1,100,000	40,402,324	86.79 %	6,151,676
000062. Swab	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000063. Uang Harian	38,864,000	0	34,030,000	900,000	34,930,000	89.88 %	3,934,000
000064. Transportasi	7,000,000	0	4,613,703	200,000	4,813,703	68.77 %	2,186,297
000065. Penginapan	680,000	0	658,621	0	658,621	96.86 %	21,379
002.0I Konsultasi Ke KPPN/Kanwil DJPb/KPKNL	8,010,000	0	6,960,000	0	6,960,000	86.89 %	1,050,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,010,000	0	6,960,000	0	6,960,000	86.89 %	1,050,000
000066. Transportasi	1,000,000	0	960,000	0	960,000	96.00 %	40,000
000067. Uang Harian	7,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	85.71 %	1,000,000
000068. Penginapan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
002.0J Penanganan Pandemi COVID-19	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
522191 Belanja Jasa Lainnya	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
000069. Penyemprotan Disinfektan	10,000	0	0	0	0	0.00 %	10,000
WA.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	6,639,096,000	0	6,528,514,325	3,500,000	6,532,014,325	98.39 %	107,081,675
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>6,639,096,000</b>	<b>0</b>	<b>6,528,514,325</b>	<b>3,500,000</b>	<b>6,532,014,325</b>	<b>98.39 %</b>	<b>107,081,675</b>
<b>EBB.951 Layanan Sarana Internal</b>	<b>850,482,000</b>	<b>0</b>	<b>847,000,000</b>	<b>0</b>	<b>847,000,000</b>	<b>99.59 %</b>	<b>3,482,000</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI  
**Satuan Kerja** : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 6 dari 6

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
053.0A Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
000075. Genset 200 kVA	850,482,000	0	847,000,000	0	847,000,000	99.59 %	3,482,000
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
051.0A Lanjutan Sarling Kantor	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,788,614,000	0	5,681,514,325	3,500,000	5,685,014,325	98.21 %	103,599,675
000071. Fisik	5,010,614,000	0	5,006,421,000	0	5,006,421,000	99.92 %	4,193,000
000072. Perencana	101,000,000	0	98,568,000	0	98,568,000	97.59 %	2,432,000
000073. Pengawas	510,000,000	0	432,176,000	0	432,176,000	84.74 %	77,824,000
000074. Pengelola Kegiatan	167,000,000	0	144,349,325	3,500,000	147,849,325	88.53 %	19,150,675

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**Satuan Kerja** : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>167,800,000</b>	<b>0</b>	<b>148,633,405</b>	<b>11,578,500</b>	<b>160,211,905</b>	<b>95.48 %</b>	<b>7,588,095</b>
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	167,800,000	0	148,633,405	11,578,500	160,211,905	95.48 %	7,588,095
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	167,800,000	0	148,633,405	11,578,500	160,211,905	95.48 %	7,588,095
BCA Perkara Hukum Perseorangan	143,800,000	0	128,633,405	9,578,500	138,211,905	96.11 %	5,588,095
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	143,800,000	0	128,633,405	9,578,500	138,211,905	96.11 %	5,588,095
051 Pendaftaran Berkas Perkara	66,405,000	0	62,595,925	1,800,000	64,395,925	96.97 %	2,009,075
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	66,405,000	0	62,595,925	1,800,000	64,395,925	96.97 %	2,009,075
521211 Belanja Bahan	8,805,000	0	8,797,700	0	8,797,700	99.92 %	7,300
000001. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	8,805,000	0	8,797,700	0	8,797,700	99.92 %	7,300
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	57,600,000	0	53,798,225	1,800,000	55,598,225	96.52 %	2,001,775
000002. Alat Tulis Kantor	57,600,000	0	53,798,225	1,800,000	55,598,225	96.52 %	2,001,775
052 Penetapan hari sidang	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
000003. Pengiriman Penetapan Hari Sidang (Kejaksanaan)	50,000	0	0	0	0	0.00 %	50,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	23,740,000	0	20,834,920	1,948,000	22,782,920	95.97 %	957,080
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	23,740,000	0	20,834,920	1,948,000	22,782,920	95.97 %	957,080
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0	1,714,920	28,000	1,742,920	72.62 %	657,080
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,400,000	0	1,714,920	28,000	1,742,920	72.62 %	657,080
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21,340,000	0	19,120,000	1,920,000	21,040,000	98.59 %	300,000
000005. Pengiriman surat penahanan dan Perpanjangan Penahanan	21,340,000	0	19,120,000	1,920,000	21,040,000	98.59 %	300,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	14,080,000	0	12,151,620	1,243,000	13,394,620	95.13 %	685,380
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	14,080,000	0	12,151,620	1,243,000	13,394,620	95.13 %	685,380
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	0	1,591,620	43,000	1,634,620	90.81 %	165,380
000006. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	1,800,000	0	1,591,620	43,000	1,634,620	90.81 %	165,380

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

**Kementerian** : 005 MAHKAMAH AGUNG  
**Unit Organisasi** : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
**Satuan Kerja** : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,280,000	0	10,560,000	1,200,000	11,760,000	95.77 %	520,000
000007. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan (Pegawai)	12,280,000	0	10,560,000	1,200,000	11,760,000	95.77 %	520,000
<b>056 Minutasi/Upaya hukum</b>	<b>31,800,000</b>	<b>0</b>	<b>27,450,000</b>	<b>3,612,500</b>	<b>31,062,500</b>	<b>97.68 %</b>	<b>737,500</b>
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	31,800,000	0	27,450,000	3,612,500	31,062,500	97.68 %	737,500
521211 Belanja Bahan	31,800,000	0	27,450,000	3,612,500	31,062,500	97.68 %	737,500
000008. Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	31,800,000	0	27,450,000	3,612,500	31,062,500	97.68 %	737,500
<b>057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama</b>	<b>4,800,000</b>	<b>0</b>	<b>3,238,440</b>	<b>720,000</b>	<b>3,958,440</b>	<b>82.47 %</b>	<b>841,560</b>
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	4,800,000	0	3,238,440	720,000	3,958,440	82.47 %	841,560
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	600,000	0	598,440	0	598,440	99.74 %	1,560
000009. Pengiriman Salinan Putusan	600,000	0	598,440	0	598,440	99.74 %	1,560
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,200,000	0	2,640,000	720,000	3,360,000	80.00 %	840,000
000010. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	2,600,000	0	1,600,000	560,000	2,160,000	83.08 %	440,000
000011. Pemberitahuan Putusan Banding	1,600,000	0	1,040,000	160,000	1,200,000	75.00 %	400,000
<b>058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama</b>	<b>2,925,000</b>	<b>0</b>	<b>2,362,500</b>	<b>255,000</b>	<b>2,617,500</b>	<b>89.49 %</b>	<b>307,500</b>
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,925,000	0	2,362,500	255,000	2,617,500	89.49 %	307,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	0	842,500	35,000	877,500	97.50 %	22,500
000012. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	900,000	0	842,500	35,000	877,500	97.50 %	22,500
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,025,000	0	1,520,000	220,000	1,740,000	85.93 %	285,000
000013. Pemberitahuan Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali	1,100,000	0	880,000	220,000	1,100,000	100.00 %	0
000014. Pemberitahuan Proses Kasasi/PK kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	925,000	0	640,000	0	640,000	69.19 %	285,000
<b>QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>91.67 %</b>	<b>2,000,000</b>
<b>QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>91.67 %</b>	<b>2,000,000</b>
<b>051 Pos Bantuan Hukum</b>	<b>24,000,000</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	<b>91.67 %</b>	<b>2,000,000</b>
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	24,000,000	0	20,000,000	2,000,000	22,000,000	91.67 %	2,000,000
522131 Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	0	20,000,000	2,000,000	22,000,000	91.67 %	2,000,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

## LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG  
Unit Organisasi : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000015. Honor Advokat Piket	24,000,000	0	20,000,000	2,000,000	22,000,000	91.67 %	2,000,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

\*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir